

DAFTAR BACAAN

Buku

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam perspektif Hukum progresif*,
Cetakan kedua, sinar grafika, Jakarta, 2011,
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2002
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, , Yogyakarta, 2004
- Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Isis Ikhwansyah, Sonny Dei Judiasih, dan Rani Suryani Pustikasari, *Hukum Kepailitan
Analisis Hukum Perselisihan & Hukum Keluarga Serta Harta Benda
Perkawinan*, Keni Media, Bandung, 2012
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, edisi 1. Cetakan 2, 2010.
- Mustofa, *Kepaniteraan Pengadilan Agama*, Jakarta: kencana, 2005
- M Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar
grafika, Jakarta, 2017.
- M Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata tentang gugatan persidangan penyitaan
pembuktian dan putusan pengadilan*, Sinar grafika, Jakarta, 2009.
- , *Kedudukan, kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta,
2009.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet.12*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, "*Hukum Orang dan keluarga (Personen En Familie-Recht)*", Cet III, Airlangga University Press, 2000.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 Tahun 1974).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443 Tahun 2004).

JURNAL

Analiansyah Rudanto, "Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Nomor

0257/Pdt.G/205/MS.Bna)”, *Samara; Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 1, Nomor 2, Juli-desember 2017

Gunawan, Budi Rahmat Hakim, Risdianti Bonok, “Sita Marital Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama”, *Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 8, Nomor 2, Oktober 2018

Ishak, 'UPAYA HUKUM DEBITOR TERHADAP PUTUSAN PAILIT', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No 65, Th.XVII (April,2015)

Julius Martin Saragih, Yunanto dan Herni Widanati, *Tanggung jawab utang-utang persatuan setelah putusnya perkawinan*, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, Nomor 1, Tahun 2017

Luthvi Febryka Nola, “Kedudukan sita umum terhadap sita lainnya dalam proses kepailitan”, *Journal Negara Hukum*, Volume 9, No.2, November 2018.

Raspati nadia putrid kk, *Perlindungan hukum terhadap kreditor dan upaya notaris membuat perjanjian kawin setelah perkawinan*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, *VeJ* Volume 5, Nomor 2, 464, 2019.

Siddik Meliasta Sebayang, “Akibat Hukum Kepailitan Suami Terhadap Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 057PK/Pdt.Sus/2010)”, *Jurnal Ilmu Hukum Umsu*, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2017

SKRIPSI/TESIS

AiselaSata T Putranto, "*Sita Marital Harta Bersama Yang Diajukan Sebelum Pailit*",

Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017.

Muhammad Misbahul Munir, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita*

Jaminan (Conservatoir Beslag) di Pengadilan Agama Sleman", Skripsi,

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.